

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu Negara yang mempunyai penduduk terbesar ke empat didunia, yang mempunyai jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa. Saat ini Indonesia terdiri dari 17.508 pulau, sekitar 6.000 diantaranya dihuni, terbagi menjadi 34 provinsi, lima diantaranya memiliki status yang berbeda. Provinsi dibagi menjadi 403 kabupaten dan 98 kota. Ada sekitar 300 kelompok yang berbeda etnis pribumi di Indonesia, dan 742 bahasa dan dialek yang berbeda (*Badan pusat statistic, 2010*).

Dengan populasi penduduk sebesar ini membuat Indonesia mempunyai banyak sekali permasalahan rumit yang terjadi dimasyarakat seperti kemacetan, kemiskinan, dan lain-lain. Permasalahan seperti ini sering terjadi di sebuah Negara yang mempunyai jumlah penduduk yang besar. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamatkan bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah sudah sangat baik dan memang yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, namun pada kenyataannya yang terjadi dilapangan saat ini belum sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang. Banyak sekali penduduk Indonesia saat ini yang masih hidup

dalam memenuhi kebutuhan mereka setiap harinya. Kemiskinan itu merupakan sebuah konsep yang amat relatif sehingga amat sulit didefinisikan. Itulah sebabnya kebanyakan dari mereka tidak berani menuliskan arti dari kemiskinan itu secara eksplisit. Meskipun demikian, sekalipun amat umum, beberapa diantara mereka menuliskan juga arti dari kemiskinan itu.

Menurut Suparlan (1993) dalam (Mubyarto, 2010), kemiskinan dapat diartikan sebagai sebuah standar tingkat hidup yang sangat rendah, yaitu karena adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Para ahli ilmu sosial sependapat bahwa penyebab utama kemiskinan adalah system ekonomi yang berlaku dalam masyarakat yang terkait. Namun, banyak menurut para ahli yang juga meyakini bahwa kemiskinan bukanlah suatu pertanda yang terwujud semata-mata hanya karena sistem ekonomi.

Kemiskinan merupakan wujud dari hasil interaksi yang melibatkan hampir semua aspek yang dimiliki manusia dalam kehidupannya. Kemiskinan umumnya diukur dengan tingkatan pendapatan, dan pada dasarnya dapat dipilah dalam kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin secara absolut, apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kebutuhan hidup minimum ini diantaranya dapat diukur dengan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan dan perumahan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Sedangkan kemiskinan relatif adalah keadaan

perbandingan antara kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sudah diatas garis kemiskinan. Sehingga, sebenarnya tidak termasuk miskin, tetapi masih lebih miskin dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (*BPS, 2010*) Nasional pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 37,7 juta atau 16,58% dari total penduduk Indonesia yang tersebar diberbagai Provinsi yang ada di Indonesia. Walaupun berganti-ganti sosok pemimpin di Indonesia, tidak banyak hal berarti saat ini. Salah satu cara pemerintah untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu/miskin, yang disebut sebagai Bansos. Bansos ini dalam bentuk batuan tunai maupun bantuan material, seperti dana BOS, Jamkesmas, PNPM, Mandiri, Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), dan lain-lain.

Bantuan sosial adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi dari kemiskinan terjadinya resiko sosial dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatannya, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Bantuan sosial memfokuskan untuk peningkatan derajat hidup masyarakat supaya terbebas dari masalah rantai kemiskinan yang berkepanjangan, mendorong dan mempercepat pertumbuhan masyarakat miskin menjadi masyarakat yang lebih produktif, mandiri dan sejahtera, dengan memperbaiki yang sudah ada.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada di Kecamatan Tabongo ini masih hidup dibawah garis kemiskinan. Berikut tabel garis kemiskinan dan penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo :

Tabel 1.1
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Gorontalo 2011-2014

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Persentase Penduduk Miskin
2011	249.151	21.05
2012	271.772	21.57
2013	295.852	20.79
2014	323.578	21.31
2015	382.722	76.93
2016	368.863	78.36
2017	343.373	80.52

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kabupaten Gorontalo dalam tahun 2011 masih berada pada angka 21.05% sedangkan tahun 2012 dengan angka 21.57%. kemudian pada tahun 2013 menurun 20.79% kemudian naik lagi di tahun 2014 dengan angka 21.21% kemudian pada tahun 2015 naik menjadi 76.93% kemudian ditahun 2016 naik lagi menjadi 78.36% dan pada tahun 2017 merupakan angka kemiskinan yang bisa dikatakan lebih tinggi kemiskinan disbanding tahun sebelumnya yaitu 80.52% . Ini disebabkan oleh banyak hal yaitu karena kualitas Sumber Daya Manusia yang masih senganat minim, banyak sekali anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah/putus sekolah, karena kurangnya kesadaran orang tua untuk

menyekolahkan anak-anak mereka, mereka cenderung memiliki anak lebih dari dua sehingga begitu banyak beban yang harus mereka tanggung, belum lagi lapangan kerja yang terbatas, serta upah minimum pekerja yang masih rendah. Rata-rata sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, pembawa bentor, dan penjual kecil-kecilan, sehingga penghasilan mereka kebanyakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada akhirnya banyak dari mereka terlibat hutang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ditambah lagi dengan akses untuk berobat ke rumah sakit yang terbilang mahal sehingga kebanyakan dari mereka tidak mampu untuk menjangkaunya. Masyarakat cenderung lari ke obat-obatan tradisional dan ke puskesmas yang fasilitasnya masih kurang lengkap dan kurang memadai. Belum lagi cara hidup masyarakat yang kurang mementingkan hidup bersih, sehingga mudah sekali terserang penyakit.

Beberapa program yang dilakukan dalam upaya pengurangan kemiskinan selama ini belum mampu memberikan hasil yang besar sehingga sampai saat ini tujuan dari pembangunan nasional terkait dengan permasalahan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Program ini juga ditujukan untuk percepatan mengurangi kemiskinan dengan mengurangi beban keluarga, sekaligus memberdayakan keluarga. Oleh karena itu, dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Dirjen Bantuan dan jaminan social (Depsos,2010) PKH dibuat untuk menolong masyarakat miskin kluster terbawah seperti bantuan bersyarat. Syarat yang ditetapkan dalam program ini merupakan

bentuk intervensi untuk mengarahkan masalah kesejahteraan dan kesenjangan gender dalam kehidupan setiap hari. Jadi tidak mengherankan jika dalam bentuk program PKH, bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) yang biasa disebut pengurus keluarga. Pemberian dana kepada pengurus keluarga dipercayai akan dapat mendorong efektifitas PKH dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kecamatan Tabongo merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Gorontalo yang mempunyai angka penduduk terbanyak serta merupakan penerima PKH di Kabupaten Gorontalo. Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu factor yang memberi kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo salah satunya Kecamatan Tabongo. Tahun 2018 ada 63.478 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang ditanggung melalui program yang digulirkan kementerian sosial tersebut. Program itu digulirkan dengan biaya Rp.1.890.000,-/KPM/tahun. Di Kabupaten Gorontalo jumlah penerima PKH mencapai 24.771 orang terbagi pada beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo terbagi atas 19 Kecamatan yang jumlah penerima PKH yakni Selama tahun 2018, jumlah penerima PKH di Kecamatan Tabongo berjumlah 1206 orang. Hal tersebut dapat dilihat dari daftar penerima PKH pada tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa Kecamatan Tabongo sudah termasuk sebagai penerima PKH. Pelaksanaan PKH di Kecamatan Tabongo merupakan sebuah solusi dari pemerintah untuk membenahi masalah pemberdayaan masyarakat sekaligus dengan masalah dalam pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2018 tercatat sejumlah 1206 yang terdaftar sebagai

penerima KPM PKH. Dengan menerima bantuan PKH, diharapkan mendorong perubahan perilaku penerima KPM untuk memperbaiki kualitas dalam pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan juga kesehatan. Selain itu, kehadiran program ini diharapkan mampu memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri.

Tabel 1.2

Daftar Penerima PKH di Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 :

No	Kecamatan	Jumlah	Ket
1	Asparaga	1202 orang	-
2	Batudaa	689 orang	-
3	Batudaa pantai	966 orang	-
4	Bilato	844 orang	-
5	Biluhu	713 orang	-
6	Boliyohuto	833 orang	-
7	Bongomeme	1962 orang	-
8	Dungaliyo	1090 orang	-
9	Limboto	1797 orang	-
10	Limboto barat	1650 orang	-
11	Mootilango	1553 orang	-
12	Pulubala	2017 orang	-
13	Telaga	814 orang	-
14	Telaga biru	1671 orang	-
15	Telaga jaya	486 orang	-
16	Tibawa	2724 orang	-
17	Tilango	769 orang	-

18	Tolangohula	1708 orang	-
19	Tabongo	1206 orang	-

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2020

Berdasarkan data diatas peneliti ingin mengetahui seberapa jauh manfaat program ini dalam pengentasan kemiskinan Kecamatan Tabongo. Mengingat Kecamatan Tabongo dipilih dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut yang kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan masyarakatnya masih dibawah standar rata-rata. Guna mendukung apakah program ini (PKH) tersebut sudah efektif maka penelitian ini lebih mengarah pada **“EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN TABONGO KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi Program Keluarga Harapan Terhadap kemiskinan ?
2. Bagaimana dampak Program Keluarga Harapan terhadap kemiskinan di Kecamatan Tabongo ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji evaluasi Program Keluarga Harapan Terhadap kemiskinan.
2. Mengkaji Dampak Program Keluarga Harapan terhadap kemiskinan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan pada peneliti dan dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama peneliti kuliah di prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Gorontalo.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, Bagi penulis berguna sebagai suatu sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan metodologi serta memiliki kemampuan dalam menganalisis setiap gejala dan permasalahan di lapangan. Dalam hal ini memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama bagi mereka yang secara serius mengamati jalannya evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) serta dapat dijadikan sebagai kontribusi terhadap pemecahan permasalahan yang terkait dengan program tersebut.